

BAB IV

Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Hambatan Investasi pada Pembangunan PLTU di Kabupaten Batang

Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang hambatan – hambatan yang di hadapi pemerintah Indonesia dalam proses investasi pembangunan PLTU di kabupaten Batang. Dimana hambatan – hambatan tersebut tidak hanya di akibatkan dari kondisi dalam negeri yaitu adanya penolakan dari masyarakat sekitar proyek serta penolakan dari kelompok – kelompok aktifis peduli lingkungan seperti greenpeace serta walhi, tetapi juga berasal dari luar negeri yaitu dari jepang sebagai investor yang menyampaikan keraguan atas keberlangsungan proses investasi tersebut.

Pada bab ke empat ini akan dibahas upaya – upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi hambatan – hambatan internal maupun eksternal dengan menggunakan beberapa konsep dalam ilmu hubungan internasional yaitu menggunakan public diplomacy untuk mengatasi hambatan dalam negeri dan summit diplomacy untuk mengatasi hambatan luar negeri. Namun bab ini akan diawal dengan penjelasan mengenai dua konsep tersebut.

Upaya pemerintah Indonesia mengatasi hambatan investasi

Demi mencapai tujuan terpenuhinya kebutuhan listrik di Jawa dan Bali, tentu pemerintah Indonesia sangat serius untuk menghadapi hambatan – hambatan yang ada. Selama proses investasi berlangsung pemerintahan Indonesia menghadapi hambatan – hambatan yang bukan hanya berasal dari luar negeri tetapi juga berasal dari dalam negeri. Dari dalam negeri tercatat beberapa hambatan yang sangat jelas yaitu dari masyarakat sekitaran proyek serta bantuan dari beberapa organisasi pecinta lingkungan nasional maupun internasional seperti Greenpeace dan Walhi. Jika hambatan ini tidak segera diselesaikan maka tentu kesempatan investasi yang besar dari luar negeri seperti ini akan terlewat dan tidak akan datang kedua kalinya ke Indonesia. Bukan hanya kehilangan investasi, bisa saja Indonesia kehilangan kepercayaan dari negara – negara lain yang akan menganggap Indonesia sebagai negara yang tidak ramah terhadap kerjasama investasi luar negeri.

Dalam pembahasan ini, upaya pemerintahan Indonesia akan dibagi menjadi dua yaitu upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dari dalam negeri serta upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi hambatan investasi yang berasal dari luar negeri. Dimana dalam mengatasi hambatan investasi luar negeri ini pemerintah Indonesia mempraktikkan konsep soft diplomacy dimana pemerintah menggunakan pendekatan secara kultural yang akan membuat hambatan bisa melunak. Sementara untuk mengatasi hambatan di dalam negeri, pemerintah Indonesia menggunakan konsep public diplomacy. Karena yang dihadapi pemerintah di dalam negeri bukanlah negara ataupun entitas INGO melainkan NGO dan masyarakat warga negara Indonesia itu sendiri.

A. Upaya pemerintah Indonesia mengatasi hambatan dalam negeri

Demi menghadapi hambatan internal yang ada dalam pembangunan PLTU di kabupaten Batang ini, dapat dilihat pemerintah Indonesia menggunakan public diplomacy kepada masyarakat yang terkena dampak investasi ini agar masalah dapat terselesaikan.

Salah satu hal yang sangat mengejutkan bahwa yang harus di hadapi pemerintah Indonesia dalam proses investasi ini adalah masyarakatnya sendiri. Dimana dalam permasalahan ini masyarakat menganggap pembangunaun PLTU ini tidak ramah dengan lingkungan dan masyarakat. masyarakat sadar bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh PLTU ini akan sangat berbahaya, mulai dari tercemarnya udara sekitar PLTU hingga tercermarnya lingkungan yang akan berdampak pada kelangsungan hidup mereka.

A.1. Sosialisasi kepada masyarakat

Pemerintah Indonesia serta PT. Bhimasena Power indonesia sadar betul bahwa yang menjadi masalah utama hambatan proyek ini adalah karena ketidak pahaman masyarakat tentang pentingnya pembangunan serta minimnya informasi yang valid tentang pembangunan PLTU di kabupaten batang ini, serta belum adanya pemahaman yang benar tentang teknologi yang digunakan oleh PLTU ini, sehingga masyarakat tentu bereaksi negatif dengan proyek ini. Sehingga hal utama yang harus dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi pemahaman proyek serta sosialisasi untuk mengatasi dampak – dampak yang akan terjadi di masa mendatang jika PLTU sudah beroperasi.

Seperti yang dilakukan pemerintah serta BPI pada tanggal 27 Januari 2016 dimana kerjasamanya mengadakan sosialisasi, serta penyaluran kompensasi sosial. Karena keterlibatan masyarakat dalam proyek merupakan kunci utama dalam menjaga kondisi sosial dan meminimalisir dampak yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan terhadap masyarakat sekitar.¹ Keterbukaan informasi dan kemudahan akses informasi selalu dilakukan oleh BPI dan pemerintah berikan kepada masyarakat lokal melalui kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyediaan papan informasi, penyediaan mekanisme penerimaan saran, surat-menyurat, dan pembentukan forum komunikasi. Sehingga masyarakat tahu bagaimana cara mengadu secara benar.

A.2 Kompensasi Sosial

Pemerintah Indonesia serta PT BPI juga tidak hanya memikirkan masalah sosialisasi, tetapi juga memikirkan masalah kompensasi sosial yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak pembangunan PLTU. Karena saat pembangunan proyek PLTU secara otomatis masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan pertanian seperti biasa sehingga sangat penting agar masyarakat bisa melanjutkan kehidupannya saat lahan mereka sudah diproses menjadi PLTU.² Dalam hal ini pemerintah dan PT.BPI melakukan beberapa hal yaitu penggantian tanah serta melakukan program CSR yang dilakukan oleh PT BPI.

¹ Sosialisasi lingkungan dan social oleh pemerintah, diakses dari laman, <http://www.bhimasenapower.co.id/content/13/sosialisasi-terkait-lingkungan-dan-sosial/4>

² Sosialisasi lingkungan dan social PLTU, diakses dari laman, <http://www.bhimasenapower.co.id/content/41/sosialisasi-lingkungan-dan-sosial/4>

Penggantian lahan pertanian ini dipandang sebagai solusi awal akan kebutuhan pertanian yang tidak mungkin menungg. Pemerintah serta PT BPI memberikan ganti lahan pertanian untuk petani yang terkena dampak pembangunan PLTU. Tanah pengganti seluas 32 hektare diberikan bagi petani penggarap yang lahan tempat bekerjanya terkena dampak pembebasan lahan PLTU di kabupaten Batang. Lahan pengganti tersebut selanjutnya telah dibagi rata kepada 218 petani terdampak. Setiap petani akan mendapat lahan garapan sekitar 1.200 m². lahan pengganti bagi petani penggarap yang terdampak ini merupakan salah satu komitmen BPI yang tercantum didalam AMDAL yang dirilis oleh pemerintah Jawa Tengah pad tahun 2013. Sementara itu, BPI juga telah menjalankan komitmen lainnya seperti dengan melakukan kegiatan pembinaan kewirausahaan yang berkelanjutan dan pemberian dana kompensasi sosial bagi petani terdampak PLTU Jawa Tengah.

Selain penggantian lahan pemerintah dan juga PT BPI melakukan program penciptaan wirausahawan baru.³ diharapkan dengan program ini akan membuat masyarakat perlahan terlepas dari ketergantungan terhadap lahan pertanian. Program ini didasarkan dengan minat dan bakat masyarakat sekitar dimana itu akan lebih mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan wirausaha. Dukungan yang diberikan untuk pendapatan masyarakat terdampak yaitu dengan memfasilitasi dan memotivasi berbagai kegiatan peningkatan pendapatan. Untuk tujuan ini, tim CSR BPI bersama dengan pemerintah akan membantu program

³ BPI gelar pemberdayaan masyarakat, diakses dari laman, <<http://www.bhimasenapower.co.id/content/2513/bpi-gelar-serangkaian-program-pemberdayaan-di--desa-desa-terdampak-pltu-jawa-tengah>>

masyarakat terdampak untuk memilih dan membuat kegiatan yang menghasilkan pendapatan layak. Untuk mencapai tujuan ini, bantuan rehabilitasi yang memadai akan ditawarkan kepada masyarakat terdampak untuk memulihkan mata pencaharian dan pendapatan mereka.

A.3 Program pemberdayaan Desa

Selain masyarakat yang dibekali dengan ilmu – ilmu wirausaha, maka desa – desa pun diberdayakan agar semakin maju dan semakin terdidik. Salah satunya adalah dibukanya perpustakaan mini di setiap desa yang terdampak program pembangunan PLTU batang. Tentu dengan adanya perpustakaan ini masyarakat lebih tergugah untuk membubukan minat baca terhadap masyarakat di sekitar pembangunan PLTU.

Pemerintah dan PT BPI bekerjasama dengan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) Kabupaten Batang, pada tanggal 23 november 2016 meresmikan 13 perpustakaan mini bagi anak-anak TPA (Taman Pendidikan Al-Quran) di desa terdampak pembangunan PLTU Jawa Tengah.⁴ Kegiatan yang dipusatkan di TPA Assalam, Desa Wonokerso ditandai dengan penyerahan buku-buku bacaan bernuansa islami yang diterima secara simbolis oleh perwakilan masing-masing TPA dari desa tersebut.

Sejak tahun 2015, Pemerintah serta BPI dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan mendukung mutu pendidikan kepada lembaga pendidikan baik formal ataupun non formal, BPI telah memberikan bantuan sarana dan prasarana

⁴ ibid

seperti meja & kursi, Al-Quran, dan lemari kepada 19 TPA/TPQ di wilayah terdampak pembangunan PLTU Jawa Tengah. Guru-guru TPA/TPQ di desa sekitar wilayah terdampak Pembangunan PLTU Batang juga telah bergabung dalam Program Kelompok Usaha Bersama (KUB), guna meningkatkan pendapatannya melalui kegiatan simpan pinjam.

A.4 Ganti Rugi Tanah

Pemerintah serta Bhimasena juga tidak menutup mata terhadap tuntutan masyarakat yang terkena dampak pembangunan PLTU. Hal ini dibuktikan dengan realisasi pada tanggal 3 Mei 2016 yaitu cairnya dana ganti tanah sebesar 5 kali NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).⁵ dimana NJOP tanah terhitung adalah sebesar 100 ribu rupiah jadi masyarakat akan menerima sebesar 500 ribu rupiah untuk setiap meter tanah yang digunakan untuk proyek PLTU Batang ini. Dan ganti rugi ini dapat di ambil di pengadilan negeri batang, dengan menunjukkan surat – surat tanah yang sah.

B. Upaya pemerintah Indonesia mengatasi hambatan luar negeri

Untuk mengatasi hambatan luar negeri yaitu dari Jepang. Pemerintah Indonesia menggunakan strategi summit diplomacy yaitu diplomasi secara tatap muka langsung antara kepala negara, dalam kasus ini adalah antara presiden Indonesia dan perdana menteri Jepang.

⁵ Ganti rugi lahan PLTU Batang, diases dari laman,
<<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/03/03/173100726/Ganti.Rugi.Lahan.PLTU.Batang.Lima.Kali.NJOP>>

Pemerintah Indonesia bukan hanya menghadapi hambatan investasi ini dari dalam negeri saja, melainkan juga mendapatkan hambatan dari luar negeri. Unikny hambatan tersebut justru datang dari pemerintah jepang sebagai badan yang mengontrol bank investor yaitu JBIC. parlemen jepang yang menyarankan agar proyek PLTU di Batang yang di danai oleh JBIC (Japan Bank for International Cooperation) ini untuk dibatalkan, alasanya didasarkan atas laporan greenpeace yang mengatasmakan 230 organisasi dari 49 negara menyatakan bahwa terjadi banyak pelanggaran HAM pada proses pembebasan lahan, sehingga proyek ini bertentangan dengan asas dasar JBIC yang menjunjung tinggi penegakan HAM.

Datang pula masukan dari parlemen yaitu dari Mizuho salah satu anggota parlemen jepang, Mizuho beranggapan PLTU yang pengoperasiannya memakai batu bara akan menyisakan limbah yang sangat buruk pengaruhnya bagi lingkungan sekitar Batang. Karena itu, dia mendesak pemerintah Jepang dan juga beberapa lembaga pemodal lain untuk menghentikan proyek itu.⁶ Sontak laporan – laporan tersebut tentu mebuat pemerintah jepang mengalami kebingungan antara menghentikan investasi atau tetap melanjutkannya.

B.1 Pada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Proyek ini dimulai pada pemerintahahan era presiden Susilo bambang yudhoyono. Mesikpun pada perjanjian di tandatangani pada tahun 2011, tetapi pada faktanya jarangny pertemuan antar pemangku kepentingan dua negara

⁶ Anggota parlemen jepang minta proyek PLTU dibatalkan, diakses dari laman, <<https://m.tempo.co/read/news/2014/09/13/078606638/parlemen-jepang-minta-proyek-pltu-batang-dibatalkan>>

mengakibatkan sempat mangkraknya proses investasi proyek ini. Sehingga presiden SBY pada sela – sela KTT APEC pada tahun 2013, Jepang dan Indonesia melakukan pembicaraan intensif tentang keberlangsungan PLTU di batang ini.⁷ Pemerintah Jepang mengungkapkan kekecewaannya karena proyek ini mangkrak selama 2 tahun dan tidak ada perkembangan. Tetapi dengan jeli presiden SBY mengungkapkan bahwa proyek tersebut sudah berjalan pada taraf pembebasan lahan sebesar 80%, terlebih lagi iklim masyarakat yang kondusif menurut SBY akan menunjang proyek ini hingga selesai. Presiden SBY juga menuturkan dengan keanekaragaman suku dan budaya yang selama ini tidak menimbulkan konflik sehingga kondisi ini sangat aman untuk kegiatan investasi, sehingga pada akhirnya pemerintah Jepang sedikit mulai yakin atas keberlangsungan proyek PLTU ini. Tetapi belum mau melakukan financial close.

Proyek tersebut kembali terbengkalai pasca pertemuan tersebut hingga pergantian presiden pada tahun 2014. Setelah kepemimpinan berganti untungnya presiden baru Joko Widodo sangat konsen terhadap masalah investasi, apalagi salah satu misinya selama lima tahun kedepan adalah untuk menjadikan Indonesia ramah dengan investasi. Disamping itu kepentingan Indonesia di bidang energy cukup mendesak, terutama bagi Jawa dan Bali yang menjadi pusat pertumbuhan Indonesia.

⁷ SBY dan PM Jepang bahas PLTU, diakses dari laman, <<https://finance.detik.com/energi/2381525/pm-jepang-dan-presiden-sby-bahas-mandeknya-proyek-pltu-batang>>

B.2 Pada Pemerintahan Joko Widodo

Pemerintahan Jokowi pun sangat memandang serius masalah ini, setelah mempelajari masalah yang ada, dan menyelesaikan masalah internal yang terjadi di Indonesia, pada awal tahun 2016 Jokowi mengadakan kunjungan ke Jepang dengan tujuan utama meyakinkan Jepang agar segera melakukan pelunasan investasi agar pembangunan bisa segera dimulai.⁸ Setelah sampai di Jepang, Presiden yang secara eksklusif bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe beberapa kali, demi menuturkan bahwa kewajiban Indonesia untuk menyelesaikan masalah lahan yang dari dulu tidak pernah usai sekarang sudah tuntas dan Indonesia meminta financial close untuk dilakukan secepatnya. Jokowi menagih JBIC untuk segera melakukan pelunasan terhadap proyek ini.

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan langsung pada tanggal 22 November 2015 ke Jepang. Agena kunjungan ini adalah untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Jepang dalam segala bidang.⁹ Dikarenakan bahasannya luas dari negosiasi pembangunan monorail hingga perdagangan sehingga isu yang sebenarnya penting seperti pembangunan PLTU hanya dibahas secara singkat. Joko Widodo meminta Jepang untuk segera melakukan financial close, tetapi Shinzo Abe menolaknya dengan alasan melihat proses pembebasan lahan di Indonesia masih belum berhasil dan dibawah target minimal Jepang yaitu 98%. Hingga pada

⁸Jokowi kejar investor Jepang, diakses dari laman, <<http://nasional.kompas.com/read/2016/06/09/14031851/kini.giliran.jokowi.kejar.investor.jepang.segera.selesaikan.proyek.pltu.batang>>

⁹ Japan – Indonesia summit meeting. Diakses dari laman, <http://www.mofa.go.jp/s_sa/sea2/id/page3e_000419.html>

akhirnya pertemuan ini gagal untuk membuat jepang melakukan financial close pada investasi PLTU di kabupaten Batang.

Presiden melanjutkan diplomasi nya pada mei tahun 2016. Kali ini kunjungan langsung ke jepang hanya khusus untuk membicarakan keberlangsungan PLTU di kabupaten Batang.¹⁰ Shinzo abe menyatakan bahwa Indonesia merupakan rekan kerjasama yang sangat penting di ASEAN. Dan ingin terus melanjutkan hubungan baik ini termasuk dengan menyelesaikan masalah investasi PLTU di kabupaten batang ini. Pada pertemuan ini jokowi menjelaskan bahwa masalah pembebasan lahan untuk PLTU sudah mencapai 98%, dalam pertemuan ini akhirnya di sepakati bahwa pembangunan PLTU harus segera dilaksanakan, dan financial close dilakukan paling lambat pada bulan juni tahun 2016. Dan secara cepat JBIC serta pemerintah jepang melakukan financial close pada bulan juni tahun 2016 sehingga bisa dibilang perjuangan mendatangkan investasi pemerintah Indonesia ini berhasil.

¹⁰ Japan – Indonesian relation. Diakses dari laman,
<http://www.mofa.go.jp/s_sa/sea2/id/page4e_000458.html>